



SOSIALISASI PENCEGAHAN *BULLYING* OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU

Reza Fajrian¹, Malida Putri¹, Fajar Utama Ritonga³
Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 2024

Revised May 2024

Accepted May 2024

Available online May 2024

Rezafajrian2020@gmail.com¹

malidaputri@usu.ac.id,

fajar.utama@usu.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Bandar Lampung.

ABSTRAK

Bullying merupakan perilaku agresif berupa kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada korban yang lebih lemah. Perilaku ini sangat merugikan korban dan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu melakukan sosialisasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan dampak sosialisasi pencegahan bullying oleh Bupati Labuhan Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa dan orangtua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan memberikan pemahaman lebih baik tentang bahaya

bullying kepada warga sekolah. Namun, diperlukan tindak lanjut berupa implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah agar perilaku ini benar-benar dapat dicegah. Disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah merupakan langkah awal yang baik, namun perlu ditingkatkan agar memberikan dampak nyata bagi pencegahan bullying di sekolah.

Kata Kunci: Sosialisasi, Bullying, Labuhan Batu

ABSTRACT

Bullying is aggressive behavior in the form of violence or intimidation carried out by an individual or group against a weaker victim. This behavior is very detrimental to the victim and has a bad impact on the child's growth and development. For this reason, the Labuhan Batu District Government conducts socialization on bullying prevention in schools. The purpose of this study is to analyze the implementation and impact of bullying prevention socialization by the Labuhan Batu Regent. This study uses a qualitative method with in-depth interviews with the education office, principals, teachers, students and parents. The results showed that the socialization carried out provided a better understanding of the dangers of bullying to school residents. However, follow-up is needed in the form of implementing anti-bullying policies in schools so that this behavior can really be prevented. It was concluded that the socialization carried out by the local government was a good initial step, but it needed to be improved in order to have a real impact on preventing bullying in schools.

Keywords: Socialization, Bullying, Labuhan Batu



PENDAHULUAN

Perilaku *bullying* telah menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Maraknya kasus *bullying* yang terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, menunjukkan bahwa perilaku ini sudah sangat membudaya di masyarakat. Berbagai survei menunjukkan prevalensi *bullying* di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Data KPAI (2019) menyebutkan bahwa selama tahun 2018 terdapat 431 kasus *bullying* dengan frekuensi tertinggi terjadi di lingkungan sekolah yaitu sebanyak 54%.

Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengganggu atau melukai korban yang dipandang lebih lemah, baik secara fisik maupun psikis. Bentuknya bisa berupa kekerasan fisik (memukul, mendorong, dll), kekerasan verbal (mengejek, meledek, dll), ataupun intimidasi psikologis melalui media sosial. Perilaku ini dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mendominasi atau mengintimidasi korban. Dampak dari *bullying* bagi korban dapat berupa trauma psikis, depresi, ketakutan berlebihan, hingga kecenderungan melakukan tindakan drastis seperti bunuh diri.

Maraknya *bullying* di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya *bullying*, rendahnya empati pelaku terhadap korban, kurang tegasnya penegakan aturan oleh sekolah maupun kepolisian, serta mudahnya akses konten kekerasan media sosial yang dapat memicu perilaku agresif. Selain itu, stigma negatif di masyarakat terhadap korban *bullying* turut mendorong maraknya kejadian ini. Seringkali korban dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas *bullying* yang dialaminya.

Untuk mengatasi persoalan *bullying*, diperlukan strategi yang komprehensif dari berbagai pihak, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu adalah dengan melaksanakan program sosialisasi pencegahan *bullying* kepada masyarakat Labuhan Batu. Program ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pelajar, akan bahaya dari perilaku *bullying*.

Namun, belum banyak penelitian di Indonesia yang mengevaluasi dampak sosialisasi anti-*bullying*, khususnya yang digagas pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan dampak program sosialisasi pencegahan *bullying* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait upaya pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis program sosialisasi pencegahan *bullying* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pelaksanaan dan dampak program dari perspektif para pelaksana dan sasaran program. Subyek penelitian ditentukan secara purposive, yang terdiri dari pihak dinas pendidikan, kepala sekolah, guru BK, dan siswa SMP di Kabupaten Labuhan Batu yang menjadi sasaran program sosialisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terkait. Wawancara



mendalam dilakukan untuk menggali data tentang perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan hasil program sosialisasi menurut pandangan para informan. Observasi juga dilakukan untuk melihat proses sosialisasi di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema yang muncul.

PEMBAHASAN DAN ISI

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan diketahui bahwa program sosialisasi pencegahan bullying di Kabupaten Labuhan Batu dilaksanakan atas inisiatif Bupati yang prihatin dengan maraknya kasus bullying yang menimpa pelajar di daerahnya. Bupati menyadari bahwa bullying berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban seperti gangguan psikologis, rasa percaya diri rendah, hingga perilaku menyimpang di kemudian hari. Oleh karena itu, sosialisasi pencegahan bullying perlu dilakukan untuk memberikan edukasi sedini mungkin kepada pelajar dan warga sekolah.

Pelaksanaan sosialisasi bullying dilakukan dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya. Materi sosialisasi meliputi pengertian bullying, jenis-jenisnya, dampak bagi korban dan pelaku, serta cara pencegahan dan penanganannya. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, dan permainan. Sasaran utama adalah para siswa SMP yang berusia remaja. Selain itu, guru dan kepala sekolah juga menjadi sasaran guna mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah dan menangani kasus bullying.

Berdasarkan observasi, sosialisasi berlangsung interaktif dengan melibatkan peran aktif peserta. Siswa terlihat antusias mengikuti permainan dan diskusi kelompok yang dikemas apik oleh pemateri dari dinas terkait. Melalui metode ini, peserta dapat memahami bullying tidak hanya secara teoritis tapi juga secara emosional. Mereka diajak berempati pada korban dan menyadari akibat dari perbuatan bullying bagi korban maupun pelaku. Guru dan kepala sekolah juga terlihat aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi kasus.

Dari sisi hasil, sebagian besar siswa mengaku mendapat pemahaman baru tentang bullying melalui sosialisasi ini. Mereka menjadi tahu bentuk-bentuk bullying, selain yang selama ini hanya dikenal dalam bentuk fisik semata. Siswa juga mendapatkan pengetahuan tentang dampak jangka panjang dari bullying dan cara mencegahnya di lingkungan sekolah. Guru BK menuturkan kasus bullying memang berkurang beberapa bulan pascasosialisasi. Namun beberapa guru lain merasa belum ada perubahan signifikan terkait perilaku bullying di sekolah mereka.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan program sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah memberikan dampak positif awal berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian terhadap anti bullying di kalangan pelajar dan warga sekolah. Akan tetapi, dari segi implementasi kebijakan anti bullying di sekolah-sekolah secara menyeluruh masih belum optimal.

Beberapa kendala yang ditemukan yaitu keterbatasan waktu sosialisasi sehingga materi kurang komprehensif, belum adanya tindak lanjut berupa penyusunan protokol anti-bullying di masing-masing sekolah, serta kurangnya konsistensi guru dalam menegakkan aturan terkait perilaku agresif siswa sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak sosialisasi, perlu ditindaklanjuti dengan program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu mendorong setiap sekolah menyusun protokol anti-bullying yang disertai sanksi tegas bagi pelaku. Protokol ini sebaiknya mengatur berbagai hal terkait pencegahan dan penanganan kasus bullying, seperti:



1. Mekanisme pelaporan kasus oleh korban atau saksi
2. Tim khusus yang bertugas menangani kasus bullying
3. Jenis sanksi bagi pelaku, bisa berupa sanksi ringan hingga skorsing
4. Pemberian konseling bagi korban dan pelaku
5. Evaluasi berkala terhadap implementasi protokol anti-bullying

Dengan protokol yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memiliki efek jera bagi pelaku bullying dan membuat mereka berpikir ulang untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu, dengan protokol yang baik korban juga akan merasa terlindungi dan berani melaporkan kasus yang dialaminya.

Sekolah juga perlu mengadakan program konseling bagi korban bullying untuk mencegah dampak psikologis jangka panjang. Program ini dapat melibatkan guru BK atau psikolog dari dinas kesehatan setempat. Melalui konseling, korban bullying dapat mengembalikan rasa percaya diri dan harga dirinya sehingga terhindar dari trauma masa kecil yang berkelanjutan hingga dewasa. Di tingkat kelas, guru perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi siswa sehari-hari dan segera menindak tegas setiap perilaku bullying verbal maupun fisik. Hal ini penting untuk membangun lingkungan kelas yang kondusif bagi proses belajar tanpa rasa takut atau intimidasi. Guru perlu memberikan teladan dan menanamkan nilai anti-bullying sejak dini kepada para siswa.

Dengan kebijakan yang menyeluruh dan konsisten dari berbagai pihak, program anti-bullying dapat memberikan hasil nyata berupa penurunan kasus bullying di lingkungan sekolah. Namun demikian, upaya ini juga perlu diimbangi dengan peran serta orangtua dan masyarakat luas.

Orangtua memiliki tanggung jawab penting untuk mengawasi perilaku anak di rumah dan memastikan mereka tidak terlibat perilaku bullying, baik sebagai korban maupun pelaku. Orangtua perlu memberikan teladan sikap anti-bullying serta menanamkan empati dan toleransi sejak dini kepada anak-anak. Apabila mengetahui anaknya terlibat bullying, orangtua harus segera mengambil langkah tegas untuk menghentikannya.

Sementara itu, masyarakat luas juga harus ikut andil dengan tidak membiarkan atau menoleransi perilaku bullying di sekitar mereka. Stigma negatif terhadap korban bullying yang selama ini berkembang perlu diubah, agar korban berani bersuara dan memperoleh dukungan untuk pemulihan. Masyarakat hendaknya melaporkan kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekitar kepada pihak berwajib.

Dengan sinergi dari berbagai elemen masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan kasus bullying dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini penting untuk memutus rantai bullying yang telah lama membudaya dan berakar di tengah masyarakat. Dengan demikian, visi Indonesia Bebas Bullying dapat segera terwujud demi masa depan anak bangsa yang lebih baik.

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Bullying

Bullying merupakan perilaku agresif dan mengganggu yang dapat menimbulkan trauma psikologis pada korban. Oleh karena itu, penanganan kasus bullying memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial yang tepat agar korban bullying dapat pulih dan terhindar dari dampak jangka panjang. Menurut UU No. 11 Tahun 2009, pelayanan kesejahteraan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi,



perlindungan, dan pemberdayaan. Dalam kasus bullying, pelayanan kesejahteraan sosial ditujukan terutama untuk rehabilitasi dan perlindungan korban.

1. Pendekatan Awal

Pendekatan awal adalah suatu proses kegiatan penjajagan awal, konsultasi dengan pihak terkait; sosialisasi program pelayanan, identifikasi calon penerima pelayanan, pemberian motivasi, seleksi, perumusan kesepakatan, dan penempatan calon penerima pelayanan; serta identifikasi saran dan prasarana pelayanan kepada pelaku bullying

2. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (Asesmen)

Asesmen adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber pelaku bullying yang merupakan klien

3. Perencanaan Pemecahan Masalah (Planning)

Perencanaan pemecahan masalah adalah suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya (manusia, biaya, metode-teknik, peralatan, sarana prasarana dan waktu) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Pelaksanaan Pemecahan Masalah (Intervention)

Pelaksanaan pemecahan masalah adalah suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi dan advokasi yang ditujukan kepada pelaku bullying selaku klien.

5. Terminasi Pemecahan Masalah

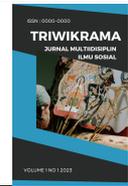
Terminasi adalah suatu proses kegiatan pemutusan hubungan pelayanan/pertolongan antara lembaga dengan penerima manfaat.

6. Bimbingan Lanjut dan Pembinaan Lanjut

Bimbingan dan pembinaan lanjut adalah suatu proses pemberdayaan dan pengembangan agar penerima pelayanan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan di lingkungan sosialnya.

KESIMPULAN

Bullying merupakan masalah sosial yang cukup serius di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi bullying di kalangan pelajar cukup tinggi. Perilaku ini berdampak buruk bagi korban, antara lain gangguan psikologis, prestasi buruk, hingga kecenderungan melakukan self-harm atau bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dari berbagai pihak untuk memulihkan dan melindungi korban bullying. Salah satu pendekatan dalam menangani korban bullying adalah melalui pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009, pelayanan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam kasus bullying, korban dapat dikategorikan PMKS yang memerlukan berbagai bentuk pelayanan tersebut agar dapat pulih dan terlindungi. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi pelaku bullying antara lain rehabilitasi psikososial melalui konseling, perlindungan melalui kerja sama dengan pihak berwajib, serta pemberdayaan melalui pendidikan anti-bullying. Implementasi pelayanan memerlukan kerja sama multisektor dan peningkatan kapasitas pekerja sosial. Dengan pelayanan yang tepat, korban bullying tidak hanya pulih, tapi juga menjadi agen perubahan untuk menciptakan Indonesia bebas bullying.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Data Kekerasan terhadap Anak. Jakarta: KPPPA.
- Pearce, N., Cross, D., Monks, H., Waters, S., & Falconer, S. (2011). Current evidence of best practice in whole-school bullying intervention and its potential to inform cyberbullying interventions. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 21(1), 1-21.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan.
- Thompson, F., & Smith, P. K. (2011). The use and effectiveness of anti-bullying strategies in schools. Research Report DFE-RR098. London: Department for Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wiyani, N. A. (2012). Save Our Children From School Bullying. *Jurnal Sosio Informa*, 1(1), 13-30.